

IRONI APA LAGI YANG HARUS KITA TANGGUNG?

Oleh: Agus Mahendra, MA.

SEKIAN puluh tahun kita berkiprah dalam olahraga (prestasi), tetapi hingga sekarang persoalan dan wacana kita selalu terbatas pada pertanyaan: bagaimanakah kita mampu unggul di SEA games? Dalam skala yang lebih mikro, daerah pun memfokuskan pertanyaan serupa: bagaimana mereka mampu unggul di PON? Akibatnya, pikiran kitapun selalu terpaku pada upaya menjawab pertanyaan itu dari waktu ke waktu.

Oleh karena itu jangan salahkan jika jawaban yang diberikan oleh orang KONI Pusat termasuk pemimpinnya selalu serupa: "Pelatnas!" Ya, pelatnas, jika mungkin pelatnas jangka panjang. Daerah pun begitu: jawabannya adalah Pelatda!

Dengan kerangka berpikir seperti itu, siapapun yang menjadi pemimpin KONI, baik daerah maupun Pusat, visinya tidak pernah jauh dari upaya memperbaiki kualitas pelatda atau pelatnas. Takarannya pun sungguh simpel; sekedar apakah ketua KONI mampu menggalang dana yang mencukupi untuk melaksanakan Pelatda/nas yang lebih baik? Lalu ramai-ramailah dicari pejabat atau pengusaha yang diperkirakan mampu melaksanakan tugas itu.

Karenanya, jangan pernah berharap bahwa pemimpin KONI yang dicari setiap menjelang Musornas atau Musorda ditakar kompetensinya dari bagaimana konsepnya tentang olahraga dan bagaimana merumuskan sistem olahraga nasional yang bisa dijadikan acuan bagi perumusan sub-sistem pembinaan yang bisa diberlakukan oleh induk-induk organisasi dan instansi terkait lainnya. Lebih jauh, KONI akhirnya abai dengan urgensi pembinaan komprehensif, yang didorong oleh mencuatnya ambisi pribadi dan *chauvinisme* sempit tentang makna "pengabdian" melalui olahraga.

Hal yang sama terjadi juga di induk organisasi. Karena tidak adanya acuan tentang bagaimana menjalankan fungsi pembinaan di tingkat induk organisasi, tidak ada koreksi sama sekali ketika induk organisasi pun meniru-niru format yang dilakukan KONI.

Jangan heran mendengar visi dari setiap top organisasi yang hanya berputar di masalah pelatnas, yang implementasinya hanya dituangkan dalam perencanaan program latihan jangka panjang. Sungguh mengherankan bahwa program latihan yang semestinya hanya menjadi tugas tim pelatih sudah menyita sedemikian banyak waktu dari organisasi olahraga setingkat PB, misalnya.

Dalam kondisi seperti itu, bidang tugas yang aktif dalam keseluruhan organisasi hanya bidang pembinaan prestasi. Bidang-bidang tugas yang lain seolah terlupakan atau dianggap tidak penting, sehingga lambat tapi pasti orang-orangnya merasa disisihkan dan mundur teratur tahu diri.

Banyaknya bidang yang tidak aktif, otomatis menurunkan kinerja organisasi olahraga yang bersangkutan, terutama bidang-bidang non teknisnya. Ambil contoh bidang organisasi dan pembinaan daerah, mereka pasti tidak diberi alokasi dana yang memadai untuk menjalankan programnya (kalau pun ada). Lebih sering, mereka sudah tahu diri terlebih dahulu, dengan berancang-ancang tidak mengajukan program apapun yang berkaitan dengan pembenahan

organisasi dan pembinaan daerah, apalagi yang terkait dengan pembinaan klub.

Karena tidak ada yang membina, klub-klub olahraga yang sudah adapun lambat laun menghilang. Mereka biasanya satu persatu rontok akibat salah urus dan kurang terpenuhinya kemampuan minimal dalam manajemen pengelolaan klub. Ini tentu sebuah ironi yang memprihatinkan.

IRONI lain tentu tidak luput dari konsekuensi mengelola olahraga secara serampangan demikian. Yakni: Di Indonesia, mengurus olahraga itu tidak perlu keahlian. Yang penting ada kemauan untuk mengabdikan, tanpa pengetahuan dan keahlian yang memadai pun sudah dipandang cukup.

Kondisi demikianlah yang menyebabkan profesi-profesi dalam bidang olahraga di Indonesia tidak pernah berkembang. Tidak ada kepentingan bagi universitas-universitas maju untuk mengembangkan program studi-program studi seperti manajemen olahraga, basic athletic trainer, sport journalism, sport therapy, sport tourism, atau sport industry, karena memang tidak dibutuhkan oleh masyarakat olahraga.

Cukuplah cetak guru penjas dan pelatih yang tidak jelas kualifikasinya, toh kebutuhan pelatih sudah terpenuhi dari eks-eks atlet yang tidak berhasil mendapatkan pekerjaan yang lebih baik.

Sejalan dengan kondisi demikian, tidak mengherankan bahwa kajian-kajian olahraga dalam konteks filosofis dan sosio-kulturalnya amat jarang ditemukan. Olahraga sungguh bukan wilayah yang menarik bagi kajian filsafat olahraga atau kajian budaya secara umum, karena tidak ada tempat sama sekali bagi kajian seperti itu.

“Olahraga,” menyitir sindiran Mendiknas A. Malik Fajar dalam satu kesempatan, “sangat kering atau ‘suwung’ dari sentuhan-sentuhan kelembutan hati nurani.”

Di sisi lain, pemerintah pun sepertinya adem ayem saja dengan permasalahan olahraga, tersibukkan oleh urusan-urusan yang lebih mendesak. Keberadaan fasilitas olahraga di lingkungan perkotaan seakan tidak diakui peranannya dalam meredam gejolak sosial masyarakatnya. Bisnis-bisnis center yang berdiri di atas peruntukan lapangan olahraga makin hari makin berhamburan tak terkendali.

Masyarakat sekitarliah yang menuai akibatnya. Institusi-institusi nonformal dalam bentuk kegiatan olahraga bersama di tingkat RT, RW hingga Kecamatan secara drastis menghilang, padahal itulah yang sejatinya mampu menampung gejolak rasa para remaja dalam masanya yang labil. Sungguh menjadi sebuah kehilangan besar bagi generasi muda sekarang, untuk mampu

menumbuhkan gaya hidup sehat melalui aktivitas fisik yang aktif.

Entah apa jadinya jika masyarakat olahraga tetap abai dengan permasalahan krusial demikian, sementara sebagian besar dari kita masih sibuk mencari-cari “pejabat” manakah yang cocok memimpin KONI agar di SEA Games mendatang kita tidak mendapat malu? Ironi apalagikah yang harus ditanggung oleh olahraga kita? *** (Penulis adalah Dosen FPOK Universitas Pendidikan Indonesia)